

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam Undang-Undang Nomor. 34 Tahun 2004 Pasal 7 ayat (2) tentang Tugas Pokok TNI dinyatakan bahwa salah satu dari tugas pokok TNI selain perang yaitu membantu tugas dari pemerintahan daerah. Maksud dari membantu tugas pemerintah di daerah adalah membantu pelaksanaan fungsi pemerintahan dalam kondisi dan situasi yang memerlukan sarana, alat, dan kemampuan TNI untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapi, antara lain membantu mengatasi akibat bencana alam, merehabilitasi infra struktur, serta mengatasi masalah akibat pemogokan dan konflik komunal.¹

Fungsi sosial TNI Angkatan Darat (TNI AD) yang diimplementasikan melalui Bhakti TNI merupakan salah satu metode pembinaan teritorial TNI AD. Tercatat beberapa program sosial yang bertujuan untuk merehabilitasi citra TNI AD, yang antara lain dilaksanakan dalam bentuk antara lain Program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD). TMMD merupakan program unggulan dalam rangka Pemberdayaan Wilayah Pertahanan (Perwilhan) yang diselenggarakan di setiap jajaran Komando Distrik Militer (Kodim) di seluruh penjuru wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Program ini diwujudkan dalam kegiatan fisik dan fisik dalam rangka mewujudkan Ruang, Alat,

¹Kartasmita, Ginanjar. *Pembangunan Untuk Rakyat Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*. Pustaka Cidesindo, Jakarta. 2005, Halaman 122

dan Kondisi Keuangan yang tangguh dalam perspektif Sistem Pertahanan Rakyat Semesta (Sishanrata).

Tentara Nasional Indonesia (TNI) merupakan bagian dari masyarakat umum yang dipersiapkan secara khusus untuk melaksanakan tugas pembelaan negara dan bangsa, serta memelihara pertahanan dan keamanan Nasional. Seperti kita ketahui bahwa saat ini bangsa Indonesia sedang memasuki suatu masa transisi, suatu masa di mana kita tengah berubah atau beralih dari suatu era yang orang menyatakan itu sebagai era ototarian kepada era demokrasi, dan perubahan seperti itu memang masih banyak ketidakpastian. Namun demikian ada satu hal yang sudah pasti bahwa perubahan tersebut tidaklah mengubah tugas dan tanggung jawab TNI selaku alat Negara bidang pertahanan dan keamanan, serta tidak mengubah sikap dan perilaku prajurit TNI yang harus senantiasa mengayomi masyarakat.²

Sebagai sebuah institusi, TNI mempunyai sumber daya dan kapasitas. Kapasitas TNI sebagai komoditas pertahanan negara sudah banyak dibahas. TNI sebagai pertahanan negara ternyata mempunyai peran terhadap pembangunan nasional. Bentuk dari peran TNI tersebut dapat dilihat dari Bhakti TNI. Bhakti TNI adalah pendayagunaan kemampuan TNI terhadap objek yang bersifat fisik material maupun mental spiritual dalam rangka menunjang pembangunan negara dan bangsa, tanpa mengabaikan kewaspadaan dan kesiapan nasional. Kegiatan bhakti TNI yang dilaksanakan oleh prajurit dan satuan TNI, bersifat membantu, terintegrasi dan selalu terarah pada usaha penyuksesan program pembangunan pemerintah pusat dan daerah didukung oleh seluruh Departemen, Pemerintah

² Syamsul Maarif, *Militer Dalam Parlemen 1960- 2004*, Prenada, 2011, halaman 1-2.

Daerah dan masyarakat. Optimalisasi peran TNI sama sekali bukan bentuk ekspansi TNI seperti dimasa lalu untuk mencampuri atau mengambil alih peran dan tugas pokok institusi lain.³

Optimalisasi peran TNI semata-mata panggilan moral atau peran fungsi TNI untuk menunaikan tugas perbantuan TNI kepada institusi atau lembaga lain seperti pemerintah daerah apabila diperlukan sesuai dengan batas kemampuan TNI. Tujuan dan sasaran yang ingin dicapai untuk mewujudkan partisipasi aktif dan kontribusi nyata TNI dalam membantu pemerintah dalam melaksanakan pembangunan nasional untuk mencapai tujuan pokok yaitu meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa, meningkatkan kecerdasan, dan kesejahteraan rakyat, membantu menegakkan disiplin, tata tertib dan hukum serta membantu meningkatkan citra bangsa Indonesia dimata dunia melalui kerjasama Internasional dibawah naungan bendera PBB. Kegiatan TMMD sasarannya adalah pembangunan fisik dan nonfisik, terutama pembangunan infrastruktur, sarana dan prasarana umum lain yang menjadi kebutuhan masyarakat di daerah, seperti jalan, rumah ibadah, sekolah, dan lain-lain.

Contoh pembangunan non fisik antara lain seperti penyuluhan-penyuluhan, pemberantasan narkoba dan penyakit sosial masyarakat, peningkatan sarana dan mutu pendidikan, modernisasi pertanian untuk mewujudkan ketahanan pangan revitalisasi agrobisnis, pemberdayaan industri kecil dan menengah (IKM), meningkatkan ekonomi nelayan, dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan. Sasaran non fisik, diarahkan untuk mendorong tumbuhnya inovasi dan kreatifitas

³ Endriantono Sutanto, *Jati Diri TNI, Mabes TNI*, Cilangkap Jakarta, 2009, halaman. 20.

masyarakat desa guna meningkatkan kualitas hidup dalam membangun daerahnya sendiri menuju kehidupan sosial yang lebih maju, sejahtera, dan mandiri. Sampai sejauh ini masyarakat dapat merasakan dampak dari dilaksanakannya TMMD, namun harus diakui bahwa pelaksanaan TMMD belum sepenuhnya dapat dilaksanakan tanpa melalui hambatan, baik yang datang dari internal seperti koordinasi dengan pemerintah daerah setempat, maupun eksternal seperti dukungan dan partisipasi masyarakat. Demikian pula yang terjadi di Desa Bram Itam Kiri Kabupaten Tanjung Jabung Barat, secara umum TMMD yang dilaksanakan di beberapa desa dapat dikatakan berhasil, namun ada juga beberapa permasalahan yang terjadi seperti koordinasi dengan pihak pemerintah kabupaten, pemerintah kecamatan dan pemerintah desa, hal ini diakibatkan oleh berbedanya garis komando tersebut, dimana TNI secara teritorial berada di bawah garis komando. Komando Resimen Militer (Korem 042 Garuda Putih) sedangkan pemerintah daerah berada di bawah garis komando bupati.

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, penulis melakukan penelitian skripsi dengan judul: **“Pelaksanaan Program Manunggal Tentara Nasional Indonesia dalam Pembangunan Desa di Desa Bram Itam Kiri Kabupaten Tanjung Jabung Barat”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang dijelaskan di depan, maka dapat ditemukan masalah bagaimana **“Pelaksanaan Program Manunggal Tentara Nasional Indonesia dalam Pembangunan Desa di Desa Bram Itam Kiri**

Kabupaten Tanjung Jabung Barat”, maka penulis memberikan batasan penelitiannya sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan program manunggal Tentara Nasional Indonesia dalam membangun Desa di Desa Bram Itam Kiri Kabupaten Tanjung Jabung Barat?
2. Apa kendala yang dihadapi dalam menjalankan program manunggal Tentara Nasional Indonesia dalam pembangunan Desa di Desa Bram Itam Kiri Kabupaten Tanjung Jabung Barat ?

C. Tujuan Penelitian dan Penulisan

a. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan program manunggal Tentara Nasional Indonesia dalam pembangunan Desa di Desa Bram Itam Kiri Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala yang dihadapi dalam menjalankan program manunggal Tentara Nasional Indonesia dalam pembangunan Desa di Desa Bram Itam Kiri Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

b. Tujuan Penulisan

1. Sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
2. Hasil penulisan ini diharapkan bermanfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan menambah referensi di perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.

3. Tambahan referensi bagi penelitian-penelitian hukum selanjutnya, khususnya penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini.
4. Secara praktis untuk mengetahui kegiatan yang dilaksanakan oleh Tentara Nasional Indonesia di Desa Bram Itam Kiri Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

D. Kerangka Konseptual

a. Pelaksanaan

Penerapan program manunggal Tetantara Nasional Indonesia di Wilayah Desa Bram Itam Kiri Kabupaten Tanjung Jabung Barat ditinjau dari aspek partisipasi Masyarakat. Pelaksana berasal dari kata laksana yang berarti bautan, sifat, dan tanda. Ditambah awalan pe- dan akhiran -an yang berfungsi membentuk kata benda menjadi pelaksana. Sedangkan, dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia yang disusun oleh Poerwadarmita, mengemukakan batasan mengenai pelaksanaan tersebut dengan terlebih dahulu mengemukakan pengertian pelaksanaan. Pelaksana adalah orang yang mengerjakan atau melakukan rencana yang telah disusun. Sedangkan pelaksanaan adalah perihal (perbuatan, usaha) melaksanakan rancangan.⁴

b. Program

Program merupakan pernyataan yang berisi kesimpulan dari beberapa harapan atau tujuan yang saling bergantung dan saling terkait, untuk mencapai suatu sasaran yang sama. Biasanya suatu program mencakup seluruh kegiatan

⁴<http://id.shvoong.com/social-sciences/sociology/2205936-pengertian-pelaksanaan-actuating/>, diakses tanggal 28 November 2023 Pukul 19.00 WIB.

yang berada di bawah unit administrasi yang sama, atau sasaran-sasaran yang saling bergantung dan saling melengkapi, yang semuanya harus dilaksanakan secara bersamaan atau berurutan. Program sering dikaitkan dengan perencanaan, persiapan, dan desain atau rancangan. Desain berasal dari bahasa Inggris yaitu dari kata *decine*. Jadi desain dalam perspektif pembelajaran adalah rencana pembelajaran. Rencana pembelajaran disebut juga dengan program pembelajaran.⁵

c. Manunggal Tentara Nasional Indonesia

Merupakan penguatan dari proses pembangunan masyarakat dengan melibatkan kelompok masyarakat yang didukung peran lembaga pemerintah melalui model pendekatan pembangunan partisipatif. Masyarakat sebagai pelaku utama dalam melaksanakan program ini, maka masyarakat menggunakan seluruh kapasitas dan perannya untuk terlibat dalam serangkaian proses pembangunan.⁶

d. Pembangunan Desa

Dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pasal 78 ayat (1) Pembangunan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa,

⁵Muhaimin, Suti'ah, dan Sugeng Listyo Prabowo, *Manajemen Pendidikan*, Jakarta, Kencana, 2009, halaman. 349.

⁶Muhamad Abibakrin Nur, *Upaya Edukatif Pada Program Tentara Manunggal Membangun Desa (Tmmd) Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat*, Universitas Pendidikan Indonesia, 2015, \.upi.edu perpustakaan.upi.edu diakses tanggal 28 November 2023 Pukul 20.00 WIB.

pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

E. Landasan Teori

1. Teori Pelaksanaan

Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap. Secara sederhana pelaksanaan bisa diartikan penerapan. Majone dan Wildavsky mengemukakan pelaksanaan sebagai evaluasi. Browne dan Wildavsky mengemukakan bahwa Pelaksanaan adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan.

Pengertian-pengertian di atas memperlihatkan bahwa kata pelaksanaan bermuara pada aktivitas, adanya aksi, tindakan, atau mekanisme suatu sistem. Ungkapan mekanisme mengandung arti bahwa pelaksanaan bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan.

Pelaksanaan merupakan aktifitas atau usaha-usaha yang dilaksanakan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan dilengkapi segala kebutuhan, alat- alat yang diperlukan, siapa yang melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya mulai dan bagaimana cara yang harus dilaksanakan, suatu proses rangkaian kegiatan tindak lanjut setelah program atau kebijaksanaan ditetapkan yang terdiri atas pengambilan keputusan, langkah yang strategis maupun operasional atau

kebijaksanaan menjadi kenyataan guna mencapai sasaran dari program yang ditetapkan semula⁵. Dari pengertian yang dikemukakan di atas dapatlah ditarik suatu kesimpulan bahwa pada dasarnya pelaksanaan suatu program yang telah ditetapkan oleh pemerintah harus sejalan dengan kondisi yang ada, baik itu di lapangan maupun di luar lapangan. Yang mana dalam kegiatannya melibatkan beberapa unsur disertai dengan usaha-usaha dan didukung oleh alat-alat penunjang.

Faktor-faktor yang dapat menunjang program pelaksanaan adalah sebagai berikut:⁷

- a. Komunikasi, merupakan suatu program yang dapat dilaksanakan dengan baik apabila jelas bagi para pelaksana. Hal ini menyangkut proses penyampaian informasi, kejelasan informasi dan konsistensi informasi yang disampaikan;
- b. Resouces (sumber daya), dalam hal ini meliputi empat komponen yaitu terpenuhinya jumlah staf dan kualitas mutu, informasi yang diperlukan guna pengambilan keputusan atau kewenangan yang cukup guna melaksanakan tugas sebagai tanggung jawab dan fasilitas yang dibutuhkan dalam pelaksanaan;
- c. Disposisi, sikap dan komitmen dari pada pelaksanaan terhadap program khususnya dari mereka yang menjadi implementasi program khususnya dari mereka yang menjadi implementer program;

⁷Budi Winarno, *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta, Media Presindo, 2005, halaman 10.

- d. Struktur Birokrasi, yaitu SOP (Standar Operating Procedures), yang mengatur tata aliran dalam pelaksanaan program. Jika hal ini tidak sulit dalam mencapai hasil yang memuaskan, karena penyelesaian khusus tanpa pola yang baku.

Keempat faktor di atas, dipandang mempengaruhi keberhasilan suatu proses implementasi, namun juga adanya keterkaitan dan saling mempengaruhi antara suatu faktor yang satu dan faktor yang lain. Selain itu dalam proses implementasi sekurang-kurangnya terdapat tiga unsur penting dan mutlak yaitu :

- a. Adanya program (kebijaksanaan) yang dilaksanakan;
- b. Kelompok masyarakat yang menjadi sasaran dan manfaat dari program perubahan dan peningkatan;
- c. Unsur pelaksanaan baik organisasi maupun perorangan yang bertanggung jawab dalam pengelolaan pelaksana dan pengawasan dari proses implementasi tersebut.

Dari pendapat di atas dapatlah dikatakan bahwa pelaksana suatu program senantiasa melibatkan ketiga unsur tersebut.

2. Teori Fungsi

Pengertian fungsi menurut Kamus Lengkap Bahasa Indonesia merupakan kegunaan suatu hal, daya guna serta pekerjaan yang dilakukan. Adapun menurut para ahli, definisi fungsi yaitu menurut The Liang Gie dalam Nining Haslinda Zainal. Fungsi merupakan sekelompok aktivitas yang tergolong pada jenis yang sama berdasarkan sifatnya, pelaksanaan ataupun

pertimbangan lainnya. Definisi tersebut memiliki persepsi yang sama dengan definisi fungsi menurut Sutarto dalam Nining Haslinda Zainal yaitu Fungsi adalah rincian tugas yang sejenis atau erat hubungannya satu sama lain untuk dilakukan oleh seorang pegawai tertentu yang masing-masing berdasarkan sekelompok aktivitas sejenis menurut sifat atau pelaksanaannya.

Menurut Musanef menjelaskan, “Yang dimaksud dengan fungsi adalah sesuatu yang harus dijalankan dan merupakan aktivitas utama sebagai bagian atau sumbangan kepada organisasi secara keseluruhan atau bagian yang tertentu.”

F. Metode Penelitian

Metode dapat diartikan sebagai prosedur atau cara untuk mengetahui atau menjalankan sesuatu melalui langkah-langkah yang sistematis. Metode penelitian merupakan suatu cara yang sistematis dalam melakukan sebuah penelitian.⁸

Menurut Soerjono Soekanto, “metode merupakan alat untuk mencapai tujuan yang akan dicapai oleh seorang peneliti.”⁹

1. Tipe Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah jenis penelitian yuridis empiris yang dengan kata lain adalah jenis penelitian dan dapat pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji semua ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi di kenyataan di masyarakat. atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan yang sebenarnya atau keadaan nyata

⁸Elisabeth Nurhaini Butarbutar, *Metode Penelitian Hukum Langkah-Langkah Untuk Menemukan Kebeneran dalam Ilmu Hukum*, PT Refika Aditama, 2018, halaman. 8.

⁹Soerjono Soekanto, *Loc Cit*, halaman. 33.

yang terjadi dimasyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menentukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan. Setelah data terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.¹⁰

2. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini sosiologis atau *socio-legal research*, yaitu pendekatan penelitian yang mengkaji persepsi dan perilaku hukum orang (manusia dan badan hukum) yang terjadi di lapangan.¹¹

3. Sumber Data

a. Kepustakaan

Teknik kepustakaan adalah penelitian kepustakaan yang dilaksanakan dengan cara membaca, menelaah dan mencatat berbagai literatur atau bahan bacaan yang sesuai dengan pokok bahasan kemudian disaring dan dituangkan dalam kerangka pemikiran secara teoretis.¹²

b. Penelitian Lapangan

Yaitu data yang diperoleh secara langsung pada objek penelitian dan merupakan sejumlah keterangan atau fakta yang secara langsung diperoleh melalui penelitian lapangan.

¹⁰Bambang Waluyo, *Penelitian hukum dalam praktek*, Sinar grafika, Jakarta, 2002, halaman 15.

¹¹Sabian Utsman, *Dasar-dasar Sosiologi Hukum, Dilengkapi Proposal Penelitian Hukum (legal Research)*, Yogyakarta, Pustaka Belajar, 2013, Cet. 3, halaman. 310.

¹²Kartini Kartono, *Pengantar Metode Research*, ALUMNI, Bandung, 2000, halaman.78.

4. Metode Pengumpulan Data

1. Wawancara

Yaitu teknik pengumpulan data dengan cara melakukan percakapan atau wawancara langsung. Wawancara dilakukan dengan Anggota Tentara Nasional Indonesia yang bertugas di Bram Itam Kiri Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

2. Observasi

Yaitu teknik pengamatan pada sebuah objek secara langsung dan detail untuk mendapatkan informasi yang benar terkait objek tersebut.

3. Dokumentasi

Yaitu teknik pengumpulan data dengan cara meneliti dan mengamati secara langsung objek yang diteliti.

5. Teknik Penentuan Sampel

Teknik penentuan sampel ini dilakukan dengan cara *Purposive Sampling* yakni suatu teknik penentuan sampel dengan cara menentukan kriteria atau persoalan terlebih dahulu yang dianggap mengetahui persoalan yang diteliti, oleh karena itu yang akan dijadikan sampel dan data penelitian adalah Anggota Tentara Nasional Indonesia yang bertugas di Bram Itam Kiri Kabupaten Tanjung Jabung Barat

6. Metode Analisis Data

Analisis data adalah mekanisme mengorganisasikan data dan mengurutkan data kedalam pola, kategori dan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema hipotesis kerja yang diterapkan oleh data. Data yang diperoleh

baik dari studi lapangan maupun studi kepustakaan diteliti dengan metode analisis deskriptif kualitatif, yaitu data yang diperoleh akan digambarkan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Metode analitik juga dimasukkan didalam penelitian ini yang mana metode yang digunakan untuk menentukan besar *result vector* secara matematis dengan menggunakan rumus.

G. Sistematika Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang menjadi dasar dalam pembahasan penulis dalam melakukan skripsi ini, maka penulis mencoba memberikan gambaran tentang isi penelitian tulisan ini melalui sistematika yang telah dirancang sedemikian rupa menjadi sistematika sebagai berikut :

Bab Pertama tentang Pendahuluan Pada bab ini merupakan bab pendahuluan yang menguraikan tentang latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian dan penulisan, kerangka konseptual metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab Kedua tentang Tinjauan umum tentang pengertian Tentara Nasional Indonesia, Sejarah terbentuknya Tentara Nasional Indonesia, peran fungsi dan tugas Tentara Nasional Indonesia dan kewajiban serta larangan Tentara Nasional Indonesia.

Bab Ketiga tentang Tinjauan umum tentang Sejarah terbentuknya TNI Manunggal Membangun Desa, definisi TNI Manunggal Membangun Desa, landasan pelaksanaan TNI Manunggal Membangun Desa dan manfaat TNI Manunggal Membangun Desa

Bab Keempat tentang Pembahasan, pada bab ini akan berupaya menjawab rumusan masalah yang dibahas pada penelitian pelaksanaan program manunggal Tentara Nasional Indonesia dalam membangun Desa di Desa Bram Itam Kiri Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan kendala yang dihadapi dalam menjalankan program manunggal Tentara Nasional Indonesia dalam membangun Desa di Desa Bram Itam Kiri Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Bab Kelima tentang Merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dalam pembahasan sebagai jawaban atas permasalahan yang diangkat, selanjutnya diikuti saran.

